



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUTHOHARUL JANAN
2. Jabatan : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
TASIKMALAYA
3. NHK : 675120

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.162.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 148 m²/148 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.050.000.000
2. Tanah Seluas 362 m² di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 112.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 161.680.000

1. MOBIL, HONDA STREAM Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 6.680.000
3. MOBIL, HONDA BRIO RS 1.2 CV RKD Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 12.222.019

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.335.902.019

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.335.902.019

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.